

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Internet adalah salah satu platform paling populer di Indonesia untuk mengungkapkan keprihatinan dan pendapat, dengan sekitar 224 juta pengguna aktif pada tahun 2022. Platform ini menyediakan ruang yang sangat terbuka, memungkinkan penggunanya menyampaikan aspirasinya secara terbuka kepada banyak orang. Media sosial digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari permasalahan pribadi yang terkesan sepele hingga isu-isu pemerintahan yang kompleks dan terkait dengan permasalahan negara atau dunia internasional. Masyarakat Indonesia sangat mengakar separuh hidupnya ke dalam internet, mulai dari berkomunikasi, berekspresi, berbelanja, transportasi, hingga mencari nafkah¹

Dengan berkembangnya teknologi, terutama internet, isu-isu penting yang sebelumnya sangat sulit disebarkan kepada masyarakat kini menjadi mudah untuk disampaikan. Seberapa mudah? Cukup dengan mengunggah konten ke media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, dan lain-lain, informasi dapat beredar luas di media sosial dan mendapatkan perhatian besar dari

¹GoodStats. (2023, Agustus 18). *80% masyarakat Indonesia mengakses internet untuk mendapat hiburan*. GoodStats.
<https://data.goodstats.id/statistic/80-masyarakat-indonesia-mengakses-internet-untuk-mendapat-hiburan-mVxoc>

masyarakat² Konsep *global village* atau desa global yang dirumuskan oleh McLuhan kini memberikan kuasa yang sangat kuat kepada teknologi untuk mempengaruhi sistem sosial-budaya masyarakat. Hubungan antara masyarakat dan media digital semakin berkembang menjadi konsep *cyber community*, di mana media digital digunakan sebagai suatu lingkup kemasyarakatan yang sangat hidup. Batasan-batasan geografis sudah tidak relevan dengan berkembangnya globalisasi, yang menandakan bahwa masyarakat telah mencapai tahap post-modernisme, di mana dunia dipenuhi dengan informasi seakan tidak pernah berhenti banjir informasi³.

Pengguna internet yang kian bertambah menggambarkan bagaimana ruang digital dapat mempengaruhi kondisi masyarakat di lapangan. Ruang digital memberikan peluang kepada individu untuk membangun relasi dan berpartisipasi dalam komunitas atau kelompok dari organisasi yang memiliki kesamaan pandangan, minat, ketertarikan, atau tujuan yang sama untuk mencapai suatu pergerakan. Dinamika kemasyarakatan kini sangat terpengaruh oleh algoritma teknologi, terutama internet⁴.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, dampak media sosial

²Purwasito, A. (2015). Komunikasi Multikultural. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

³ Ilham, I. (2018). Paradigma Postmodernisme; Solusi Untuk Kehidupan Sosial? (Sebuah Pandangan Teoritis dan Analitis terhadap Paradigma Postmodernisme. Jurnal Sosiologi USK, 12(1), 1-22.

⁴ Universitas Gadjah Mada. (2024, 21 Februari). Pengaruh dunia digital dalam membentuk pola hidup dan mental yang sehat.

<https://ugm.ac.id/id/berita/pengaruh-dunia-digital-dalam-membentuk-pola-hidup-dan-mental-yang-sehat/>

terhadap dinamika masyarakat Indonesia di internet menjadi semakin terlihat. Kini, masyarakat sangat vokal dalam menyampaikan aspirasi mereka secara online⁵. Pemakaian fitur di media sosial menjadi krusial dalam menyebarkan pesan-pesan penting, baik kepada sesama masyarakat maupun kepada pemerintah sebagai bentuk aktivisme digital⁶

Aktivisme digital merujuk pada bentuk aktivisme yang memanfaatkan internet dan media digital sebagai platform utama untuk melakukan kampanye, komunikasi, dan mobilisasi massa guna mendorong perubahan sosial-politik. Secara lebih spesifik, aktivisme digital mencakup berbagai metode, seperti petisi online, kampanye tagar (hashtag activism), dan bentuk-bentuk serupa lainnya⁷. Namun, penting untuk dicatat bahwa aktivisme digital bukan hanya sebatas aksi online. Aktivisme ini sering kali melibatkan tindakan offline sebagai kelanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan di dunia maya, dengan tujuan memperkuat dampak sosial dari gerakan tersebut.⁸

⁵ Putri, N. K. (2019, November 28). *Internet dan cara baru menyuarkan kampanye hijau di Indonesia*. Universitas Airlangga. <https://unair.ac.id/internet-dan-cara-baru-menyuarakan-kampanye-hijau-di-indonesia/>

⁶ Rochmawati, A., & Alamiyah, S. S. (2024). Aktivisme media sosial di Instagram: Studi literatur. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 2572–2580. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i3.4085>

⁷ Zahira, D., & Hermanadi, H. (2021). Memetakan aliran aktivisme digital: Sebuah pergerakan sosial. Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/23-CfDS-Case-Study-Memetakan-Aliran-Aktivisme-Digital-Sebuah-Pergerakan-Sosial.pdf>

⁸ Zahira, D., & Hermanadi, H. (2021). Memetakan aliran aktivisme digital: Sebuah pergerakan sosial. Center for Digital Society, Universitas Gadjah Mada. <https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1423/2021/01/23-CfDS-Case-Study-Memetakan-Aliran-Aktivisme-Digital-Sebuah-Pergerakan-Sosial.pdf>

Aktivisme digital sangat efektif sebagai sarana mobilisasi politik akar rumput dan menyediakan cara-cara baru untuk melibatkan para demonstran. Selain itu, aksi-aksi online dapat menjadi penting di negara-negara di mana ruang publik secara konvensional diatur dengan ketat atau berada di bawah kuasa militer. Dalam konteks ini, aksi online menjadi opsi yang lebih masuk akal dan lebih efektif daripada aksi langsung yang sangat berbahaya, karena adanya ancaman fisik bagi para pelakunya⁹ Protes online dapat digunakan sebagai opsi yang lebih masuk akal untuk melawan lembaga-lembaga transnasional. Untuk mencegah aktivisme digital dianggap sebagai pembangkangan sipil elektronik, beberapa aktivis meminta agar gerakan politik daring ini selalu mewakili kepentingan komunal dan bukan tindakan terorisme siber atau peretasan kriminal¹⁰

Fenomena aktivisme yang muncul di tengah masyarakat menjadi cerminan nyata atas kekhawatiran dan aspirasi terkait pemindahan ibu kota. Para aktivis berperan penting dalam mengawal proses pemindahan tersebut agar berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan politik yang menyertainya.

⁹ Brillyanto, R. A. R. (2021). *Aktivisme digital dalam mempromosikan hak asasi manusia di Indonesia: Studi kasus Amnesty International Indonesia* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinik.ac.id/dspace/bitstream/123456789/60713/1/RADEN%20AHMAD%20ROSYIDDIN%20BRILLYANTO.FISIP.pdf>

¹⁰ Fuentes, Marcela A.. "digital activism". Encyclopedia Britannica, 9 Jan. 2023, <https://www.britannica.com/topic/digital-activism>. Accessed 26 June 2024.

Isu pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara sangat relevan dalam konteks perkembangan aktivisme digital, terutama di media sosial. Meskipun fenomena aktivisme digital sudah ada jauh sebelum proyek pemindahan ibu kota ini, perdebatan mengenai pemindahan ibu kota menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan di media sosial. Hal ini memunculkan keberpihakan yang lebih jelas di kalangan masyarakat, yakni antara yang mendukung dan yang menentang, dibandingkan dengan fenomena politik lainnya di media sosial, seperti perdebatan politik terkait Pilpres 2019¹¹.

Pada isu pemindahan ibu kota, keberpihakan yang muncul lebih tegas, yaitu antara pihak yang setuju dan yang tidak setuju. Hal ini berbeda dengan isu-isu lain yang lebih ambigu, seperti fenomena "cebong kampret" pada Pilpres 2019, dimana keberpihakan politiknya cenderung lebih kabur dan tidak selalu berkelompok dengan jelas. Selain itu, dalam peristiwa seperti Pemilihan Presiden 2019 atau 2024, terdapat kelompok pemilih yang lebih heterogen, dengan adanya pendukung tetap (pro) dan pemilih mengambang (swing voters), yang membuat pembagian kelompok lebih rumit¹²

Perpindahan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa mencerminkan kondisi pada tahun 2019 ketika Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan

¹¹ Noviananda, D. (2024). *Bingkai media lokal Kalimantan tentang pemindahan ibu kota negara (IKN)*. ePrints Undip. <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/22339>

¹² Ramadhan, M. R. (2019). *Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara*. BEM FEB UGM.

rencana tersebut. Lokasi ibu kota baru mencakup sebagian besar wilayah administratif Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan ini menjadi salah satu proyek prioritas strategis yang diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Realisasi proyek tersebut memerlukan pendanaan sebesar Rp 466 triliun, yang mayoritas direncanakan bersumber dari skema dukungan pendanaan atau pembiayaan internasional¹³.

Pada tahun 2024, realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) menunjukkan gambaran yang kurang optimis¹⁴ Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, mengakui bahwa hingga saat ini belum ada investor asing yang merealisasikan investasinya di IKN¹⁵. Pernyataan ini bertolak belakang dengan klaimnya pada akhir tahun 2023, di mana ia menyatakan bahwa terdapat banyak perusahaan asing yang telah berkomitmen untuk berinvestasi di IKN dengan nilai total mencapai Rp50 triliun¹⁶ Bahlil menyebut bahwa investasi tersebut terutama

¹³ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2019, Agustus 26). *Pemindahan ibu kota, 26 Agustus 2019, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta*. <https://setkab.go.id/pemindahan-ibu-kota-26-agustus-2019-di-istana-negara-provinsi-dki-jakarta/>

¹⁴ Kompas.com. (2024, Januari 27). Hingga Januari 2024, realisasi investasi di IKN capai Rp 47,5 triliun. *Kompas.com*. <https://ikn.kompas.com/read/2024/01/27/110000687/hingga-januari-2024-realisasi-investasi-di-ikn-capai-rp-47-5-triliun>

¹⁵ Tempo.co. (2024, Juni 27). Belum ada investor asing masuk IKN, anggota dewan sentil Bahlil. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/belum-ada-investor-asing-masuk-ikn-anggota-dewan-sentil-bahlil-50163>

¹⁶ Asmaaysi, A. (2024, June 13). *Bahlil soal investasi asing IKN: Dulu sebut sudah Rp50 triliun, kini akui belum ada*. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240613/45/1773739/bahlil-soal-investasi-asing-ikn-dulu-sebut-sudah-rp50-triliun-kini-akui-belum-ada>

berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti prhotelan, pusat perbelanjaan, sarana pendidikan, dan fasilitas kesehatan¹⁷

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa hingga April 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mencapai Rp4,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 12,1 persen dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 39,8 triliun. Fakta ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat¹⁸. Sebagian pihak menilai bahwa hal tersebut sangat disayangkan, mengingat pembangunan IKN seharusnya mengandalkan investasi pihak swasta, sebagaimana yang direncanakan pada awalnya. Kritik ini kemudian memicu aktivisme digital terkait isu pembangunan IKN, dengan berbagai opini bermunculan, baik yang mendukung maupun yang menentang kebijakan tersebut¹⁹.

Greenpeace Indonesia mengkritik pembangunan IKN karena dapat

¹⁷ Galih Pratama, "Duh! Ternyata Belum Ada Investor Asing Masuk ke IKN," *Infobanknews*, 13 Juni 2024, <https://infobanknews.com/duh-ternyata-belum-ada-investor-asing-masuk-ke-ikn/>.

¹⁸ Sri Mulyani Indrawati, "Menkeu Sri Mulyani Catat Realisasi Anggaran untuk IKN per April 2024 Rp 4,8 Triliun, Sejak 2022 Total Rp 72,3 Triliun," *Tempo.co*, 13 Juni 2024, <https://www.tempo.co/ekonomi/menkeu-sri-mulyani-catat-realisasi-anggaran-untuk-ikn-per-april-2024-rp-4-8-triliun-sejak-2022-total-rp-72-3-triliun-54998>.

¹⁹ BBC Indonesia. (2024, 13 Juni). *IKN Nusantara: Siapa yang mendanai pembangunan ibu kota baru?* BBC Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd17vpr8kjo>

merusak lingkungan di hutan Kalimantan Timur²⁰ Selain itu, pakar hukum dari UNAIR²¹ menyoroti bahwa pembangunan IKN menggusur masyarakat adat di wilayah Kalimantan Timur, yang menambah kerumitan masalah ini. Dengan adanya kontroversi ini, muncul pertanyaan apakah diskusi yang terjadi di media sosial berasal dari pengguna yang asli dan tervalidasi atau tidak²².

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), kehadiran bot di media sosial menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Ketidakpastian terkait realisasi investasi asing, tingginya ketergantungan pada anggaran negara, serta kritik dari berbagai pihak terhadap dampak sosial dan lingkungan pembangunan IKN telah memicu gelombang perdebatan di ranah media sosial²³. Situasi ini membuka peluang bagi penggunaan bot untuk memperbesar atau membentuk persepsi publik secara artifisial. Dengan mengendalikan opini di media sosial, aktor-aktor tertentu dapat memanfaatkan kerentanan ini untuk menggiring narasi, memperkuat aktivisme digital, atau bahkan menciptakan polarisasi terhadap

²⁰ Febiola, A. (2024, March 5). *Greenpeace Kritik konsep smart forest city IKN Jokowi: Hutan Alam Terancam*. Tempo. <https://bisnis.tempo.co/read/1841097/greenpeace-kritik-konsep-smart-forest-city-ikn-jokowi-hutan-alam-terancam>

²¹ News, U. (2024, March 18). *Pakar Hukum Unair Kritik Penggusuran Masyarakat Adat di IKN*. Universitas Airlangga Official Website. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-kritik-penggusuran-masyarakat-adat-di-ikn/>

²² Greenpeace Indonesia, “‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79,” *Greenpeace Indonesia*, 17 Agustus 2024, <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/58996/indonesia-is-not-for-sale-seruan-masyarakat-sipil-dan-warga-korban-ikn-di-hut-ri-ke-79/>.

²³ Media Indonesia. (2023, 18 November). *Pepesan kosong investasi asing IKN*. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/3269-pepesan-kosong-investasi-asing-ikn

kebijakan pemindahan ibu kota²⁴ Oleh karena itu, penting untuk mempertanyakan keaslian percakapan seputar IKN dan mengkaji sejauh mana peran bot dalam dinamika tersebut.

Secara umum, bot media sosial adalah program otomatis yang digunakan untuk berinteraksi di media sosial. Bot ini dapat beroperasi secara otonom sebagian atau sepenuhnya, dan sering kali dirancang untuk meniru perilaku pengguna manusia²⁵. Meskipun banyak bot yang digunakan untuk tujuan baik, terdapat pula banyak bot media sosial yang digunakan untuk tujuan jahat, seperti melakukan penggiringan opini atau menyerang suatu situs media sosial. Bot media sosial mudah dikendalikan, dengan beberapa ratus atau ribuan bot bisa dikelola oleh satu orang saja²⁶.

Penelitian tentang gerakan sosial daring telah menunjukkan peran jaringan digital dalam menginformasikan para aktivis politik²⁷. Namun, kendala yang muncul adalah bagaimana gerakan sosial di media sosial bisa dibajak oleh bot untuk kepentingan tertentu, yang bertujuan untuk memecah pergerakan sosial tersebut. Media sosial menjadi tantangan tersendiri bagi para aktivis ketika

²⁴ Tempo.co. (2015, 28 Agustus). *12 ungkap reaksi netizen soal pemindahan ibu kota ke Kaltim*. <https://www.tempo.co/politik/i2-ungkap-reaksi-netizen-soal-pemindahan-ibu-kota-ke-kaltim-712717>

²⁵ What is a social media bot? | social media bot definition | cloudflare. (n.d.). <https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-social-media-bot/>

²⁶ Cloudflare, "Apa Itu Bot Media Sosial?" *Cloudflare*, <https://www.cloudflare.com/learning/bots/what-is-a-social-media-bot/>.

²⁷ Tiara Apriyani, "Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital," *Kalijaga Journal of Communication*, Vol. 3, No. 1 (2021): 17–30, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/kjc/article/download/2218/1461>.

pergerakan mereka dibajak oleh bot, yang dapat digunakan sebagai alat propaganda komputasi²⁸.

Data empiris menunjukkan bahwa aktivitas di media sosial tidak semata-mata menjadi bentuk gangguan, melainkan dapat menjadi kekuatan signifikan yang mampu mengubah lanskap diskursus politik. Sebagai contoh, dalam studi yang dilakukan oleh Ferrara et al., ditemukan bahwa selama masa kampanye Pemilihan Umum Amerika Serikat tahun 2016, akun-akun bot menghasilkan sekitar 3,8 juta cuitan, atau setara dengan 19% dari total cuitan terkait pemilu. Selain itu, akun-akun tersebut juga berkontribusi terhadap sekitar 15% dari total populasi pengguna yang terlibat dalam diskusi politik tersebut. Temuan ini menegaskan adanya fenomena amplifikasi berlebihan yang dilakukan melalui konten terotomasi atau penggunaan akun bot, yang dapat membanjiri tagar-tagar gerakan sosial dan menyebabkan pesan-pesan organik menjadi tersamarkan²⁹.

Lebih lanjut, dalam kasus Presiden Donald Trump, meskipun akun bot hanya mewakili sekitar 1% dari total pengguna, mereka diketahui menghasilkan lebih dari 31% dari seluruh cuitan yang berkaitan dengan isu tersebut. Ketimpangan proporsional ini menggambarkan bahwa jumlah bot yang relatif

²⁸ Mark Travers, "Beware of Fake Online Activism, or 'Slacktivism'," *Psychology Today*, 7 November 2023, [https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202311/beware-of-fake-online-activism-or-slacktivism.​;contentReference\[oaicite:1\]{index=1}](https://www.psychologytoday.com/us/blog/social-instincts/202311/beware-of-fake-online-activism-or-slacktivism.​;contentReference[oaicite:1]{index=1})

kecil sudah cukup untuk mendominasi arus informasi dan mempengaruhi persepsi publik secara luas—sebuah teknik yang secara langsung mendukung strategi manipulasi opini³⁰.

Dalam konteks yang lebih kontemporer, laporan *Associated Press* (AP News) tahun 2023 mencatat keberadaan jaringan bot pro-Trump yang terdiri atas ratusan ribu akun. Jaringan ini secara aktif mempromosikan narasi tertentu serta menyerang lawan-lawan politik dengan teknik serupa seperti yang digunakan pada tahun 2016³⁰. Propaganda komputasi adalah fenomena yang mencakup kesalahan informasi digital dan upaya manipulasi di era digitalisasi³¹. Propaganda komputasi didefinisikan sebagai penggunaan algoritma, otomatisasi, dan kurasi manusia untuk sengaja mendistribusikan informasi yang menyesatkan melalui jaringan media sosial. Propaganda komputasi melibatkan bot, akun palsu, dan akun anonim yang memanipulasi opini publik di berbagai platform media sosial dan jaringan perangkat³². Kasus serupa juga pernah terjadi di Myanmar pada tahun 2017, ketika algoritma Facebook (Meta) secara otomatis mempromosikan konten yang mengandung kebencian terhadap Rohingya,

²⁹ Ferrara, E., & Bessi, A. (2016, November 8). *Millions of political tweets from fake accounts, USC study finds*. USC Today. <https://today.usc.edu/millions-of-political-tweets-from-fake-accounts-usc-study-finds/>

³⁰ Klepper, D. (2023, March 6). *Thousands of pro-Trump bots are attacking DeSantis, Haley*. AP News. <https://apnews.com/article/4d61487294f9218855b8e6e89f0c8ccc>

³¹ Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). Automation, algorithms, and politics | political communication, computational propaganda, and autonomous agents—Introduction. *International Journal of Communication*, 10, 9

³² Tiara Apriyani, “Peran Sosial Media pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Digital,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1 (2021): 17–30, <https://journal.untar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/11086/8872>.

sementara bot dan akun-akun yang terkoordinasi dengan militer Myanmar memperluas jangkauan ujaran kebencian tersebut. Kegagalan dalam moderasi konten ini memicu gelombang kekerasan dan genosida terhadap etnis Rohingya, yang kemudian diungkap oleh Amnesty International dan melalui investigasi oleh Reuters³³.

Aktor politik anonim memanfaatkan elemen kunci dari propaganda komputasi, seperti penyebaran berita palsu, kampanye disinformasi yang terkoordinasi, dan kelompok troll untuk menyerang isu-isu tertentu, termasuk dalam konteks pemindahan ibu kota Nusantara³⁵. Propaganda komputasi dalam aktivisme digital memiliki kekuatan besar dalam membangun atau menghancurkan narasi sebagai upaya terkoordinasi untuk menyampaikan pesan, dengan memanfaatkan botnet atau kelompok automasi robot yang ada di media sosial³⁴.

Kondisi ini sangat signifikan mengingat semakin mendalamnya propaganda komputasi di ranah digital. Para pengguna media sosial kini dihadapkan pada kesulitan dalam membedakan antara informasi yang benar dan yang salah³⁵.

³³ Amnesty International. (2022, 29 September). *Myanmar: Sistem Facebook mempromosikan kekerasan terhadap Rohingya; Meta berutang ganti rugi – laporan baru*.
<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2022/09/myanmar-facebooks-systems-promoted-violence-against-rohingya-meta-owes-reparations-new-report/>

³⁴ Chu, Z., Gianvecchio, S., Wang, H., & Jajodia, S. (2010). Who is tweeting on Twitter: human, bot, or cyborg? Proceedings of the 26th Annual Computer Security Applications Conference, 21–30.
<https://doi.org/10.1145/1920261.1920265>

³⁵ Diyauddin. (2022, April 5). *Propaganda dan rekayasa media sosial*. Lab45.
<https://www.lab45.id/detail/182/propaganda-dan-rekayasa-media-sosial>

Pengaruh otomasi informasi dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini dapat dilihat dalam perdebatan mengenai pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara³⁶. Penelitian Madya dan Prastowo (2023) menemukan jejaring wacana pemindahan IKN di YouTube dengan 392 video, yang menunjukkan bahwa kanal-kanal mainstream yang terafiliasi dengan pemerintah pusat mendominasi tampilan³⁷. Sementara itu, konten yang bersifat lokal-sentris, seperti isu sosial-ekologi, cenderung terpinggirkan. Dominasi ini mengindikasikan peran algoritma rekomendasi YouTube dalam memperkuat narasi tertentu, sebuah bentuk otomasi informasi yang secara tidak langsung mengekang keragaman sudut pandang dalam wacana publik³⁸.

Isu pemindahan ibu kota menjadi salah satu topik yang dibahas secara luas maupun diperdebatkan sengit di media sosial. Pemerintah Presiden Joko Widodo memanfaatkan strategi komunikasi digital ini untuk membangun dukungan publik³⁹.

Sejak diumumkannya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) secara

³⁶ Dini Allifa, Indah Kurniya Dwi Saputry, Marsa Adellia Br Siahaan, Dewi Andreyan, & Hamdi Abdullah Hasibuan. (2024). ANCAMAN DISINFORMASI TERHADAP STABILITAS DEMOKRASI DI INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 8(3), 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i3.7369>

³⁷ Madya, S. H., & Prastowo, F. R. (2023). Jejaring wacana pemindahan ibu kota negara: Eksplorasi data YouTube. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 7–11. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/2>

³⁸ Madya, S. H., & Prastowo, F. R. (2023). Jejaring wacana pemindahan ibu kota negara: Eksplorasi data YouTube. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 7–11. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/2>

³⁹ Sihotang, A. (2023). Strategi komunikasi Media Center Indonesia Maju dalam mengatasi disinformasi. *Jurnal Ilmiah Multiple*, 6(2), 1–12. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/download/804/579/2852>

resmi pada Agustus 2019, berbagai penolakan muncul dari masyarakat, baik di Jakarta maupun di sejumlah daerah lainnya. Sebagai contoh, pada 7 Februari 2022, ratusan orang melakukan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI untuk menolak rencana tersebut. Aksi ini turut disertai oleh petisi bertajuk “Pak Presiden, 2022–2024 Bukan Waktunya Memindahkan Ibu Kota” yang ditandatangani oleh 45 tokoh nasional, termasuk Busyro Muqoddas dan Faisal Basri⁴⁰.

Selanjutnya, pada 1 April 2022, Pengurus Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH) bersama sejumlah mahasiswa kembali menggelar demonstrasi di depan DPR RI. Mereka menolak pemindahan IKN dan mendesak pemerintah untuk lebih memprioritaskan penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi, dibandingkan dengan proyek besar ini.

Di ruang digital, perdebatan mengenai pemindahan IKN juga berlangsung intens, khususnya di platform X (sebelumnya Twitter)⁴¹. Berbagai kanal resmi pemerintah, termasuk yang terafiliasi dengan Bappenas, aktif mengunggah konten yang mendukung pemindahan IKN⁴². Sementara itu, suara-suara kritis dari perspektif lokal, terutama yang menyoroti isu sosial-ekologi dan hak masyarakat

⁴⁰ Ramairamai Menolak Pemindahan Ibu Kota Negara," *Kompas.com*, 7 Februari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/07/05400031/ramai-ramai-menolak-pemindahan-ibu-kota-negara-?page=all>.

⁴¹ Fegiansyah, F. (2023). *Opinion leaders dan jaringan sosial di media sosial Twitter dalam diskursus pengesahan UU Ibu Kota Negara* (Skripsi Sarjana, Universitas Gadjah Mada). Repository UGM. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/225399>

adat, cenderung terpinggirkan dalam wacana publik⁴³.

Kontestasi antara pihak pro dan kontra terhadap pemindahan Ibu Kota Negara juga terlihat jelas di ranah daring. Berdasarkan data dari studi Social Network Analysis yang dilakukan oleh Fahrudin et al. (ITATS) pada Mei 2022, mayoritas warganet di platform X (sebelumnya Twitter) menunjukkan dukungan terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dukungan ini umumnya didasarkan pada harapan akan pemerataan pembangunan ekonomi dan infrastruktur di luar Pulau Jawa⁴⁴. Namun demikian, hasil analisis sentimen menggunakan model Long Short-Term Memory (LSTM) dan Word2Vec yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya menunjukkan hasil yang berbeda. Analisis tersebut, yang memiliki akurasi sebesar 95%, berhasil mengelompokkan opini warganet menjadi dua kutub: positif dan negatif, dengan proporsi yang hampir seimbang. Temuan ini mengindikasikan bahwa opini publik mengenai pemindahan IKN sangat terpolarisasi di ruang digital⁴⁵.

Dalam diskusi mengenai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke

⁴² Sunesti, Y., & Putri, A. K. (2023). Narasi ibukota negara Indonesia baru di Twitter: Dari isu kearifan lokal hingga isu anak muda. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 53–60. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/11>

⁴³ Sunesti, Y., & Putri, A. K. (2023). Narasi ibukota negara Indonesia baru di Twitter: Dari isu kearifan lokal hingga isu anak muda. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 53–60. <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/11>

⁴⁴ Tresna Maulana Fahrudin, Ibnu Zahy' Atha Illah, dan Primus Akbar Atnanda, "Analisis Percakapan di Media Sosial Twitter Terkait Pemindahan Ibu Kota Menggunakan Social Network Analysis Berbasis Model Jejaring Tersentralisasi," *Prosiding Seminar Nasional Teknik Elektro, Sistem Informasi, dan Teknik Informatika (SNESTIK)*, vol. 1, no. 1, hlm. 1–7, 2022, <https://ejurnal.itats.ac.id/snestik/article/view/2799>.

⁴⁵ Yunico Ardian Pradana, Imam Cholissodin, dan Diva Kurnianingtyas, "Analisis Sentimen Pemindahan Ibu Kota Indonesia pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode LSTM dan Word2Vec," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (J-PTIIK)*, vol. 7, no. 5, hlm. 2389–2397, 2023, <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/12731/5789>

Nusantara, media sosial menjadi ruang utama bagi berlangsungnya perdebatan publik. Sejumlah penelitian terdahulu telah memetakan sentimen pengguna media sosial terhadap kebijakan ini. Analisis terhadap ribuan unggahan di platform Twitter yang dilakukan oleh Prio dan Santoso (2024) serta Aripriyanto et al. (2022) menunjukkan bahwa sentimen netral hingga negatif mendominasi diskursus publik. Namun demikian, sebagian besar studi tersebut belum mampu membedakan secara eksplisit antara akun organik (manusia) dan akun tidak organik (bot)⁴⁶⁴⁷.

Di luar lingkup akademik, sejumlah laporan media juga mengindikasikan adanya aktivitas terkoordinasi oleh buzzer, bot, atau akun anonim dalam membentuk opini publik yang mendukung pemerintah. Liputan6 (2024) dan RMOL (2025) melaporkan adanya keterlibatan relawan serta influencer dalam menyebarkan narasi pro-IKN dan merespons kritik secara agresif. Meskipun

Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji deteksi bot dalam konteks diskursus mengenai IKN Nusantara. Padahal, pendekatan teknis seperti analisis metadata, Social Network Analysis (SNA), serta pemanfaatan algoritma seperti *Botometer* atau model *BERT-VGG16* telah

⁴⁶ Prio, D. S. (2024). *Klasifikasi sentimen masyarakat pasca Undang-Undang Pemindahan Ibukota Nusantara dari media sosial Twitter menggunakan metode Bidirectional Encoder Representations from Transformers* (Skripsi Sarjana, Universitas Wijaya Putra). <https://repository.uwp.ac.id/id/eprint/202>

⁴⁷ Aripriyanto, S., Tukino, Sufyan, A., & Nandaputra, R. (2022). *Sentimen analisis Twitter Ibu Kota Negara Nusantara menggunakan Long Short-Term Memory dan Lexicon Based*. EXPERT: Jurnal Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi, 12(2), 119-129. <https://doi.org/10.36448/expert.v12i2.2821>

terbukti efektif dalam mendeteksi keberadaan bot pada isu-isu politik lainnya⁴⁸⁴⁹.

Belum ada studi kuantitatif yang mengeksplorasi peran bot dalam mempromosikan narasi perpindahan ibu kota ke Nusantara di media sosial merupakan fakta yang menarik untuk ditindaklanjuti. Berdasarkan teori propaganda komputasi yang dikemukakan oleh Woolley dan Howard (2016) serta temuan Ferrara et al. (2016) dalam kasus kampanye politik di Amerika Serikat, maka penting untuk diteliti keterlibatan akun-akun terotomasi dalam isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Pemberitaan mengenai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi topik hangat di media sosial, khususnya pada platform X (sebelumnya Twitter). Fenomena ini mencerminkan tingginya perhatian serta keterlibatan publik terhadap proyek pemindahan ibu kota yang berskala nasional dan strategis. Diskursus digital yang berkembang mencakup berbagai aspek, mulai dari progres pembangunan, dukungan investor, hingga kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan. Diskursus ini juga mencerminkan pergeseran pola komunikasi politik yang semakin terdistribusi dan partisipatif melalui media sosial (Bruns & Highfield, 2016)⁵⁰.

⁴⁸ Ilias, L., Kazelidis, I. M., & Askounis, D. (2023). *Multimodal detection of bots on X (Twitter) using transformers*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2308.14484>

⁴⁹ Sudoyo, W. (2024, Januari 26). *Kominfo ungkap ada bot spamming di akun medsos pasangan capres*. InfoPublik. <https://infopublik.id/kategori/pemilu/820429/kominfo-ungkap-ada-bot-spamming-di-akun-medsos-pasangan-capres>

⁵⁰ Bruns, A., & Highfield, T. (2016). *Is Habermas on Twitter? Social media and the public sphere*. In A. Bruns, G. Enli, E. Skogerbo, A. Larsson, & C. Christensen (Eds.), *The Routledge Companion to Social Media and Politics*

Pemindahan Ibukota Negara (IKN) memiliki signifikansi yang besar karena merupakan salah satu program prioritas nasional, bahkan dapat disebut sebagai program mercusuar pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sebagai proyek berskala besar dengan konsekuensi multidimensi, keberadaan IKN menjadi isu publik yang tidak hanya dibahas di forum resmi, tetapi juga menjadi bahan diskusi luas di ruang digital. Misalnya, akun-akun media seperti @detikcom dan @kompascom rutin melaporkan perkembangan IKN, yang kemudian memicu ratusan hingga ribuan komentar dari warganet. Dinamika wacana publik di media sosial menunjukkan bahwa proyek ini bukan hanya urusan teknokratis pemerintah, melainkan juga menjadi bagian dari narasi kebangsaan yang diperebutkan di ruang opini publik.

Di platform X, diskusi mengenai IKN mencuat secara masif dengan narasi yang memicu polarisasi tajam di kalangan warganet. Contohnya, tagar seperti #DukungIKN dan #TolakIKN pernah bersaing dalam *trending topic* pada waktu bersamaan, mencerminkan perpecahan opini. Polarisasi terlihat dari perbedaan tajam antara kelompok yang mendukung kebijakan pemerintah dan kelompok yang menolak, dengan alasan-alasan yang beragam mulai dari isu lingkungan (seperti ancaman terhadap kawasan hutan lindung di Kalimantan Timur), kekhawatiran ekonomi (soal beban APBN), hingga persoalan transparansi dan keterlibatan publik dalam perencanaan kebijakan. Konfrontasi antara kedua kubu

ini tercermin dalam nada (tone) unggahan yang saling bertentangan secara eksplisit, misalnya dengan cuitan seperti “IKN untuk oligarki, bukan rakyat” versus “IKN adalah masa depan Indonesia”.

Periode Agustus 2019 hingga Januari 2022 merupakan fase menguatnya narasi pro-IKN secara masif di media sosial. Fase ini ditandai oleh berbagai peristiwa penting seperti peresmian proyek IKN oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019⁵¹ dan pengumuman nama “Nusantara” oleh Menteri PPN/Bappenas pada 17 Januari 2022⁵². Tagar seperti #IKNNusantara, #IbuKotaBaru, dan #MajuBersamaIKN mendadak menjadi trending topic. Sebagai contoh, pada hari pengumuman nama “Nusantara”, tagar #IKNNusantara sempat mencapai lebih dari 15.000 cuitan dalam 24 jam, menurut data dari Trendsmap⁵³.

Namun, terdapat sejumlah kejanggalan yang ditemukan dalam pola aktivitas digital tersebut. Banyak akun yang menyuarakan narasi pro-IKN merupakan akun-akun baru yang dibuat dalam beberapa minggu terakhir sebelum peristiwa penting tersebut, dengan jumlah interaksi rendah, dan konten unggahan seragam. Misalnya, ditemukan puluhan akun dengan tweet identik seperti: *“IKN Nusantara adalah simbol kemajuan Indonesia. Mari dukung demi masa depan*

⁵¹ Presiden Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara*. perpres-63-tahun-2022.pdf

⁵² Bappenas. (2022). *Siaran Pers: Pengumuman Nama Resmi IKN “Nusantara”*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. <https://bappenas.go.id>

⁵³ Trendsmap. (n.d.). *Real-time Twitter trending topics mapping*. <https://www.trendsmap.com/>

generasi kita!  *#IKNNusantara*”. Waktu unggahan dari akun-akun tersebut juga sangat berdekatan, dengan rentang hanya 2–5 menit, dan berasal dari akun yang tidak memiliki interaksi lain di luar topik IKN.

Konsistensi pola ini menimbulkan dugaan bahwa terdapat aktivitas tidak organik dalam penyebaran narasi pro-IKN, yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Dalam kajian oleh Zannettou et al. (2019) mengenai deteksi bot di media sosial, pola unggahan seragam dan waktu publikasi yang terkoordinasi merupakan ciri utama dari aktivitas bot.

Dugaan ini mengarah pada keterlibatan akun-akun bot yang digunakan secara terstruktur dan masif, baik untuk menyebarkan narasi yang mendukung maupun yang menentang proyek IKN. Tujuannya diduga untuk membangun kesan dukungan publik yang besar, mendominasi percakapan digital, serta menekan opini kritis. Hal ini mengingatkan pada studi oleh Woolley dan Howard (2016)⁵⁴, yang menunjukkan bahwa bot politik sering digunakan dalam kampanye untuk membentuk persepsi publik secara manipulatif, seperti yang terjadi dalam Pemilu AS 2016.

Karakteristik akun bot yang ditemukan antara lain: tidak memiliki foto profil nyata, nama pengguna acak (misal: @user6789XYZ), jumlah pengikut di bawah 10, dan hanya aktif memposting konten dukungan terhadap IKN.

⁵⁴ Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). *Automation, algorithms, and politics: Political communication, computational propaganda, and autonomous agents*. *International Journal of Communication*, 10, 4882–4890.

Berdasarkan penelusuran terhadap data cuitan selama minggu pengumuman nama IKN, ditemukan lebih dari 400 tweet identik yang menyebar dalam waktu singkat, tanpa disertai aktivitas lain seperti membalas komentar atau mengikuti diskusi. Akun-akun ini juga aktif hanya pada periode tertentu, terutama saat ada pengumuman pemerintah.

Fenomena ini menunjukkan pentingnya kajian terhadap manipulasi opini publik melalui media sosial, terutama dalam konteks proyek kebijakan strategis. Penggunaan akun bot dapat menciptakan realitas digital buatan, menciptakan *illusion of consensus* (ilusi kesepakatan publik). Dalam konteks demokrasi digital, hal ini dapat menyesatkan pengambilan keputusan berbasis opini publik yang sebenarnya tidak representatif (Howard et al., 2018)⁵⁵.

Melalui penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana demokrasi digital di Indonesia berfungsi, serta bagaimana keberadaan bot memengaruhi dinamika diskusi politik. Studi kasus mengenai IKN dijadikan sebagai contoh utama untuk menganalisis bagaimana teknologi seperti bot digunakan dalam membentuk opini publik. Contoh serupa terjadi dalam pemilu Brasil 2018, di mana ribuan akun bot digunakan untuk menyebarkan konten politik secara sistematis (Arnaudo, 2017)⁵⁶.

⁵⁵ Howard, P. N., Ganesh, B., Liotsiou, D., Kelly, J., & Francois, C. (2018). *The IRA, social media and political polarization in the United States, 2012–2018*. Computational Propaganda Research Project, Oxford Internet Institute. <https://comprop.oii.ox.ac.uk/>

⁵⁶ Arnaudo, D. (2017). *Computational propaganda in Brazil: Social bots during elections*. Computational Propaganda Research Project, Oxford Internet Institute. <https://comprop.oii.ox.ac.uk/research/brazil-2017/>

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi penanggulangan manipulasi opini publik, serta membangun sistem komunikasi kebijakan yang lebih etis dan transparan. Penelitian terdahulu oleh Howard dan Woolley (2016)⁵⁷ menunjukkan bahwa bot sering digunakan dalam kampanye politik untuk memengaruhi opini publik secara masif. Temuan ini menguatkan urgensi untuk melakukan investigasi lebih lanjut terhadap praktik serupa di Indonesia, khususnya dalam konteks proyek besar seperti IKN.

Oleh karena itu, diperlukan audit publik secara berkala terhadap penggunaan bot dalam komunikasi kebijakan. Selain itu, platform seperti X perlu mengembangkan dan menerapkan sistem deteksi otomatis terhadap aktivitas tidak autentik. Di sisi lain, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi hal yang penting agar pengguna dapat membedakan antara opini yang organik dan kampanye terkoordinasi yang bersifat manipulatif.

Bagaimana pola aktivitas akun bot dalam diskursus digital mengenai proyek Ibu Kota Negara (IKN) di platform X, dan bagaimana keberadaan akun-akun tersebut mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi proyek IKN?

1.2 Rumusan Masalah

⁵⁷ Woolley, S. C., & Howard, P. N. (2016). *Automation, algorithms, and politics: Political communication, computational propaganda, and autonomous agents*. *International Journal of Communication*, 10, 4882–4890.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan pola aktivitas akun bot yang terlibat dalam penyebaran narasi pro-pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) di platform X?
2. Bagaimana akun bot tersebut membentuk ilusi dukungan publik terhadap proyek IKN melalui praktik aktivisme digital di media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengidentifikasi karakteristik dan pola aktivitas akun bot dalam kampanye pro-IKN di media sosial.
2. Menganalisis peran akun bot dalam menciptakan narasi yang membentuk kesan dukungan publik terhadap proyek IKN.
3. Mengevaluasi implikasi fenomena ini terhadap kualitas demokrasi digital di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama, yaitu teoritis, praktis, dan akademik. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian dalam bidang ilmu sosial dan komunikasi politik digital, khususnya terkait aktivisme digital, propaganda komputasi, dan demokrasi digital. Melalui pendekatan campuran

(mixed methods), penelitian ini menyajikan pemahaman empiris tentang bagaimana akun bot dapat merekayasa keterlibatan publik dan membentuk persepsi sosial dalam ruang digital. Dengan demikian, studi ini juga berkontribusi pada penguatan wacana mengenai pentingnya menjaga ekosistem media sosial yang sehat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih adaptif terhadap fenomena propaganda digital, termasuk regulasi transparansi algoritma serta pengawasan terhadap penyalahgunaan akun otomatis. Penelitian ini juga memberi masukan kepada platform media sosial untuk mengembangkan fitur pelaporan dan deteksi akun tidak otentik secara lebih efektif. Bagi masyarakat umum, temuan ini mendorong pentingnya peningkatan literasi digital agar mampu mengenali manipulasi opini publik yang dilakukan melalui akun bot atau buzzer, yang berpotensi membungkam kritik dan merusak diskursus publik.

Dari sisi akademik, penelitian ini menyediakan data empiris dan kerangka awal bagi pengembangan studi lanjutan dalam bidang komunikasi digital dan ilmu pemerintahan. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi untuk eksplorasi lanjutan dengan pendekatan seperti social network analysis, analisis wacana kritis, maupun survei kuantitatif untuk mengukur persepsi publik secara lebih luas terhadap fenomena manipulasi digital dalam ruang demokrasi.

1.5 Tinjauan Perpustakaan

Bagian pertama tinjauan pustaka ini disusun berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Selanjutnya, tinjauan pustaka ini akan memasuki tahap perspektif teoritis, dimana akan diuraikan beberapa teori dan konsep dalam ilmu pemerintahan dengan menggunakan berbagai perspektif, model, dan paradigma. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan berita kontemporer mengenai kasus Daniel sebagai bahan analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

1.5.1 Penelitian Sebelumnya

Media sosial merupakan salah satu teknologi berbasis informasi (TI) yang menjadi ciri khas dari Era Informasi atau Era Digital. Media sosial terdiri dari sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologis dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan pembuatan serta pertukaran Konten Buatan Pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010). Seiring dengan perkembangan zaman, media sosial telah menjadi istilah yang sangat populer dan merambah ke berbagai generasi. Kehadiran media sosial memungkinkan kegiatan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan tatap muka, kini dapat dilakukan secara virtual, baik secara simultan maupun asinkron.

Internet telah menjadi elemen yang krusial karena hampir seluruh aktivitas dapat dilakukan secara digital. Penetrasi pengguna internet global telah meningkat pesat, dengan lebih dari 50% populasi dunia yang terhubung, mencapai 7,83 miliar orang (Kemp, 2021). Dari jumlah tersebut, sekitar 5,22

miliar orang merupakan pengguna telepon seluler unik. Fenomena ini menjadikan pembahasan mengenai proses demokrasi di ruang publik, khususnya di media sosial, sangat relevan. Penelitian mengenai demokrasi di media sosial telah banyak dilakukan, salah satunya adalah penelitian yang berjudul *Twitter dan Masa Depan Politik Indonesia: Analisis Perkembangan Komunikasi Politik Lokal lewat Internet* yang dilakukan oleh Fatanti pada tahun 2014. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa aktivitas politik di Twitter tidak selalu berhubungan langsung dengan kemenangan politik kandidat. Meskipun demikian, komunikasi politik kontemporer melalui media sosial masih tergolong baru dalam konteks demokrasi, khususnya di Indonesia.

Menurut Barber (2003), internet menyediakan alternatif komunikasi yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dan menyuarakan pendapat tanpa perantaraan elit politik. Kondisi ini menciptakan wacana yang dapat menantang hierarki komunikasi politik yang ada, sehingga mendukung prinsip-prinsip demokrasi langsung. Dalam konteks ini, dialog antar masyarakat menjadi semakin intens, dan terkadang, institusi politik dapat terabaikan. Dalam kerangka demokrasi, hal ini efektif untuk membangun ikatan yang kuat antara masyarakat sipil, sehingga komunitas virtual dapat membatasi peran institusi politik yang cenderung korup dan elitis. Di ruang ini, masyarakat dapat saling berinteraksi tanpa rasa takut bahwa politisi atau pengambil kebijakan akan mengabaikan ekspresi mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah (2013) berjudul “*Demokrasi di Ruang Publik: Langsung, Publik, Bebas, dan Tanpa Rahasia di Media Sosial Twitter @triomacan2000*” menyimpulkan bahwa ruang publik media sosial, seperti akun Twitter @triomacan2000, berfungsi sebagai arena demokrasi. Di dalamnya, terjadi pertukaran makna melalui berbagai bentuk interaksi, seperti penolakan, dukungan, dan kritik antar individu yang terlibat. Dalam banyak kasus, individu-individu ini saling mengkritik satu sama lain. Meskipun penelitian ini membahas mengenai dinamika demokrasi di media sosial, perbedaannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada, sebuah isu yang belum pernah diteliti sebelumnya dalam konteks tersebut.

Kata "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" yang berarti "rakyat" dan "kratos" yang berarti "pemerintahan". Secara sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Singkatnya, menurut Robert A. Dahl, demokrasi memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif, menciptakan kesetaraan dalam memilih, menjamin pemahaman yang jelas, menjalankan kontrol akhir atas agenda, dan mencakup seluruh warga negara dewasa. Konsekuensi dari prinsip-prinsip demokrasi ini menjadi standar umum dalam menilai apakah suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokratis (Darma, 2012).

Demokrasi digital merujuk pada praktik demokrasi yang memanfaatkan

media digital online dalam komunikasi politik, sebagaimana dijelaskan oleh Van Dijk (2013). Wahono (dalam Sinaga, 2011) juga mencatat bahwa perkembangan Web 2.0 telah memberikan hak partisipatif kepada penggunanya, yang berdampak signifikan pada berbagai aspek politik. Hal ini termasuk munculnya istilah-istilah baru seperti diplomasi 2.0, demokrasi 2.0, dan pemerintahan 2.0. Situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter, menjadi sarana ideal bagi politisi untuk mempromosikan diri. Hal ini dikarenakan platform tersebut memungkinkan politisi untuk dengan cepat menyampaikan informasi terkait aktivitas politik mereka kepada publik (Aharony, 2012).

Penelitian mengenai peran media dan dampaknya terhadap masyarakat serta demokrasi telah dilakukan sejak lama. Salah satu penelitian yang membahas topik ini adalah karya Hill dan Sen (2005) yang berjudul *Internet dalam Demokrasi Baru Indonesia*. Penelitian ini menganalisis korelasi antara media, perkembangan tahun-tahun awal rezim Orde Baru, serta munculnya Internet dan digitalisasi di Indonesia, yang berlanjut hingga runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998.

Pada masa Orde Baru, media berada di bawah kendali rezim otoriter, terutama ketika Presiden Soeharto semakin menguasai media dan pendidikan jurnalisme. Namun, Hill dan Sen (2005) mengakui bahwa Internet dan teknologi baru mulai menggoyahkan kekuasaan rezim otoriter tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan rezim untuk mengendalikan teknologi baru yang digunakan

dalam media, yang akhirnya memperkenalkan ruang bagi kebebasan berpendapat dan informasi yang lebih terbuka.

Di sisi lain, Tapsell (2017) dalam bukunya *Kekuatan Media di Indonesia: Oligarki, Warga Negara, dan Revolusi Digital* menekankan hubungan yang kuat antara oligarki dan media serta dampaknya terhadap politik Indonesia. Ia terutama mencermati perkembangan oligarki media pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan bagaimana pengaruhnya terhadap proses pemilu antara tahun 2004 hingga 2014.

Selain itu, dalam buku *Media Sosial dan Pemilu Indonesia 2019* (Hui, 2020), penulis menganalisis peran penting media sosial dalam mempengaruhi pemilih pada Pemilu 2019, dengan fokus pada regulasi terkait hoaks dan buzzer selama masa kampanye pemilu. Hal ini berkaitan dengan teori hegemoni yang diungkapkan oleh Gramsci. Teori hegemoni merupakan konsep yang berakar pada pemikiran Marxis abad ke-20 (Bates, 1975). Ide hegemoni sendiri menjelaskan tentang landasan ekonomi masyarakat, pembentukan kebudayaan, nilai-nilai, dan ideologi utama yang terbentuk melalui penguasaan struktur ekonomi (budaya) masyarakat. Sebagaimana dicatat oleh Gramsci, kelas penguasa mengontrol struktur politik dan ideologi utama dengan cara mengendalikan akses, tidak melalui kekerasan, melainkan dengan persetujuan dari mereka yang berada di bawahnya (Altheide, 1984).

Prinsip mendasar dalam teori Gramsci adalah masyarakat tidak hanya

diatur dengan kekerasan tetapi juga melalui ideologi, dimana pemimpin politik mengambil kendali dan memperoleh persetujuan yang diberikan oleh pemimpin melalui fusi dan konsensus (menetapkan hegemoni) (Bates, 1975, pp. 351-352).

Dalam konteks media, hegemoni media merujuk pada dominasi dan manipulasi berbagai aspek kehidupan serta pilihan berdasarkan budaya atau ideologi dominan. Konsep hegemoni menurut Gramsci dimulai dari bawah, yakni pandangan sebagian kelas pekerja terhadap kelas penguasa dan elit (seperti yang dijelaskan dalam konsep opini publik Gramscian), tanpa melibatkan kekerasan dalam praktiknya. Teori hegemoni ini semakin ditekankan dalam menjelaskan peran sensor dalam media, yang dapat diuraikan melalui pendekatan Gramscian (Bunn, 2015). Menurut teori hegemoni Gramsci, sensor (tindakan pengawasan) dapat dipahami sebagai alat dan pelengkap yang semakin memperumit struktur ideologi, termasuk aliansi antara media dan penguasa (Bunn, 2015, h. 35).

Menurut Althusser (1972), negara tidak selalu memerlukan represi untuk mempertahankan kekuasaan dan kontrol. Dalam teori Althusser yang berakar pada teori Gramsci, negara menggunakan Aparatus Negara Ideologi (ISA) untuk mencapai hegemoni melalui pesan-pesan budaya, seperti media. Meskipun penyensoran dan kebijakan dapat menjadi faktor penting dalam mendukung ISA, struktur hegemonik itu sendiri dibangun berdasarkan konsensus, bukan melalui represi. Pendapat ini juga didukung oleh Foucault (1980), yang berpendapat bahwa produksi ide tidak dapat terjadi tanpa adanya instrumen dan bentuk

penindasan yang mendukungnya. Kontrol media melalui disinformasi dan sensor dapat mengganggu berfungsinya demokrasi.

Hal ini bermula dari konsep hegemoni Gramsci, yang menggambarkan bagaimana kontrol hegemonik dapat dilakukan melalui alat-alat yang digunakan untuk mengubah opini publik. Berdasarkan pemikiran Gramsci, pengendalian hegemonik dapat terjadi meskipun tanpa tindakan koersif. Namun, pembatasan kebebasan berekspresi, meskipun tidak melibatkan kekerasan, akan merusak kebebasan tersebut dalam struktur demokrasi suatu negara.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode penelitian campuran yang menggabungkan kajian teoritis dan tinjauan hukum untuk mengkaji aktivisme palsu terkait kasus pemindahan ibu kota Jakarta ke Nusantara. Selain itu, akan dilakukan analisis data yang mencerminkan kemungkinan keterlibatan bot dalam diskursus tersebut. Pengumpulan data akan menggunakan berbagai alat bantu analisis data induktif dan hasil penelitian kualitatif, yang akan menekankan pentingnya makna dari data yang dianalisis daripada sekadar generalisasi.

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data terkait dengan tantangan dalam menangani masalah fake activism. Pendekatan ini didasarkan pada pendekatan deskriptif yang akan menjelaskan

kondisi atau situasi di masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian campuran ini, peneliti akan mengidentifikasi variabel-variabel yang terkait dengan pengaruh bot terhadap isu pemindahan ibu kota Indonesia, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelaskan berbagai realitas sosial yang ditemukan secara deskriptif.

1.6.2 Subyek Penelitian

Subjek penelitian ini mencakup seluruh aktor yang terlibat dalam kasus perpindahan ibu kota ke Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika diskusi yang terjadi di kalangan pengguna media sosial, serta mengidentifikasi indikasi-indikasi yang muncul dalam diskursus tersebut, termasuk potensi keterlibatan bot dalam diskusi tersebut. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada pemahaman pengaruh dan dampak penggunaan bot dalam diskursus media sosial, dengan penekanan pada kebebasan berekspresi di platform media sosial.

Dengan demikian, artikel ini berupaya untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana pemanfaatan bot dapat memengaruhi kritik, aktivisme, dan ekspresi di media sosial, serta potensi hambatan yang timbul terhadap kebebasan berekspresi dalam konteks tersebut.

1.6.3 Sumber Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber data, antara lain:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui informasi yang telah diverifikasi secara cermat. Peneliti akan memfokuskan pencarian data primer pada media sosial, khususnya pada platform X, yang saat ini menjadi sarana utama dalam membahas isu perpindahan ibu kota. Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menentukan karakteristik pembahasan yang dilakukan oleh pemilik akun, guna mengidentifikasi apakah pemilik akun tersebut merupakan individu nyata dengan pendapat atau hanya sebuah bot yang terlibat dalam diskusi.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam konteks penggunaan bot dalam diskusi media sosial mengenai perpindahan ibu kota ke Nusantara akan merujuk pada kasus-kasus politik sebelumnya yang diduga melibatkan pengerahan bot dalam proses diskusinya. Data ini tidak diperoleh langsung oleh pengumpul data, melainkan melalui dokumen, buku, atau perantara manusia. Sumber data tersebut mencakup berbagai referensi seperti buku, literatur, media online, dan jurnal yang relevan.

1.6.4 Etika Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan etika penelitian berdasarkan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Loisel et al. (2004), sebagaimana dibahas dalam Palestina (2007).

1. Menghormati martabat manusia (*menghormati martabat manusia*)

Peneliti mempertimbangkan hak dan kewajiban subjek penelitian terkait dengan penerimaan informasi mengenai proses penelitian, memberikan kebebasan untuk memilih, serta berpartisipasi dalam penelitian. Hal ini mencakup prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dalam penyusunan informed consent yang diberikan oleh peneliti.

2. Hormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian (*menghormati privasi dan kepercayaan diri*)

Penghormatan terhadap privasi dan kerahasiaan subjek penelitian menjadi prinsip utama dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada keterbukaan informasi pribadi, termasuk data pribadi. Oleh karena itu, peneliti bertanggung jawab untuk menghormati dan menjaga hak-hak dasar individu yang terlibat dalam penelitian.

3. Keadilan dan Inklusi (*menghormati keadilan dan inklusivitas*)

Penelitian ini dilaksanakan dengan prinsip kejujuran, ketelitian, kompetensi, dan kemanusiaan, serta memperhatikan sensitivitas, kedekatan, perasaan psikologis, dan religiusitas subjek penelitian. Kebijakan utama dalam penelitian ini adalah pembagian manfaat dan beban yang adil, berdasarkan kebutuhan, kemampuan, dan kontribusi sosial, dengan memperhatikan pilihan bebas subjek. Peneliti juga mempertimbangkan kesetaraan hak gender dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh subjek penelitian, baik pada

tahap awal, selama proses, maupun setelah penelitian selesai.

4. Pertimbangkan kelebihan dan kekurangan (*menyeimbangkan kerugian dan manfaat*)

Penelitian ini bertujuan untuk menggunakan metode yang dapat menghasilkan temuan yang berharga dan dapat digeneralisasikan pada tingkat populasi. Peneliti berupaya meminimalkan risiko yang mungkin ditimbulkan bagi subjek penelitian dengan memastikan bahwa tidak ada kerugian yang terjadi selama penelitian (non-harm). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada potensi risiko yang mungkin muncul.

1.6.5

Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi konkrit yang memungkinkan adanya pemahaman tentang sifat dan karakteristik data serta membantu memecahkan masalah, khususnya dalam konteks penelitian ini. Beberapa cara menganalisis data untuk metode kualitatif antara lain:

1. Reduksi data

Reduksi data menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah dari catatan penelitian. Aktivitas ini berlangsung sepanjang proyek atau pengumpulan data, yang melibatkan peringkasan, pengkodean, pelacakan tema, pembuatan kelompok, pembagian, dan pencatatan. Tujuannya adalah untuk mengatur, mengkategorikan, mengarahkan, menghilangkan kelebihan, dan menyusun data untuk memudahkan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

2. Presentasi Data

Argumen data berpotensi mendukung penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jenis informasi yang disajikan antara lain cerita, gambar, jaringan, link tindakan, tabel, dan lain sebagainya, semuanya bertujuan untuk mengorganisasikan informasi agar mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Verifikasi Data atau Menarik Kesimpulan.

Dalam reduksi data, informasi diorganisasikan untuk memudahkan identifikasi peristiwa. Langkah terakhir adalah mengkaji data untuk menarik kesimpulan dan mencari makna fenomena tahun, mengenal keteraturan, susunan, sebab akibat fenomena, dan alur preposisi. Kesimpulan dihasilkan dari aktivitas konfigurasi dan dapat diverifikasi selama dan setelah penelitian.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Konsep Aktivisme Digital di Media Sosial

Aktivisme Digital, atau yang juga dikenal sebagai Slacktivism, adalah aksi online yang dilakukan sebagai respon terhadap isu sosial yang ada. Gerakan ini tidak memerlukan komitmen atau keahlian khusus, dapat dengan mudah ditiru, dan sangat mudah dibagikan atau diproduksi oleh masyarakat digital. Aktivisme ini juga melibatkan politik yang sudah ada sebelumnya. Konsep ini muncul ketika teknologi mulai digunakan untuk mendorong aktivitas masyarakat sipil, terutama dalam konteks negara demokrasi. Dengan teknologi seperti ponsel, internet, dan media sosial, aktivisme digital semakin menyebar ke berbagai negara di seluruh

dunia, termasuk Indonesia. Kini, semua orang memiliki kesempatan untuk menjadi aktivis, meskipun secara digital.

Aktivisme digital sering kali terlihat dalam eskalasi protes politik yang kemudian menggulingkan penguasa otoriter, seperti fenomena revolusi di negara-negara Arab yang dikenal dengan Arab Spring. Penjelasan mengenai konteks aktivisme digital berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dalam kampanye dan aktivisme tertentu, serta dalam konteks ekonomi, sosial, dan politik dimana teknologi tersebut digunakan. Istilah 'digital' sendiri disepakati memiliki potensi kecepatan, keandalan, skala, dan biaya rendah yang ditawarkan oleh teknologi digital. Teknologi ini dapat digunakan secara komprehensif dan eksklusif; komprehensif mencakup semua praktik kampanye sosial dan politik yang menggunakan infrastruktur jaringan digital, sementara eksklusif berarti tidak termasuk bentuk-bentuk praktik aktivisme yang menggunakan teknologi tetapi tidak terhubung ke dalam jaringan digital.⁵⁸

Kutipan ini berdasarkan salah satu publikasi utama mengenai aktivisme digital yang paling banyak dikutip, yaitu *Digital Activism Decoded: The New Mechanics of Change* dari Joyce, M. Publikasi ini dikembangkan kembali dan dikaji lebih spesifik dalam buku bertajuk *Digital Activism in Asia Reader* (Lim, 2019; Nishant, Puthiya, & Sumandro, 2015), yang merinci pembahasan ke dalam

⁵⁸ Joyce, M. (Ed.). (2010a). *Digital activism decoded: the new mechanics of change*. New York: International Debate Education Association.

konteks wilayah Asia, di mana Indonesia menjadi bagian penting.

Aktivisme digital sendiri bergantung pada faktor visibilitas dan popularitas. Berbagai praktik aktivisme digital saat ini menghadapi tantangan untuk tetap menjadi gerakan yang berkelanjutan. Visibilitas yang dimaksud adalah popularitasnya di media sosial, yang dapat diukur dan dievaluasi dengan berbagai metrik yang ada. Sebagian besar metrik ini berfokus pada konten yang populer dan berdampak pada pendapatan utama media sosial, yaitu iklan. Oleh karena itu, para pelaku aktivisme digital harus memiliki kesadaran bahwa teknologi yang mereka gunakan dalam praktik aktivisme tidak didesain untuk kepentingan publik.

Dengan memanfaatkan algoritma media sosial yang memoderasi konten untuk menarik perhatian pengguna, aktivisme digital yang berhasil menarik perhatian khalayak yang tepat akan menghasilkan perhatian pada isu-isu sosial tertentu. Ini kemudian dapat memantik diskusi lebih dalam, sehingga isu tersebut secara langsung dapat memicu pergerakan dan memperdalam pergerakan politik.

A. Urgensi Aktivisme Digital di Media Sosial

Penelitian berdasarkan teori Gramsci menekankan pentingnya memahami realitas aktivisme digital di media sosial. Evaluasi perilaku aktivisme digital mencerminkan kualitas dan tingkat kebebasan demokrasi di Indonesia pada waktu tertentu. Memahami aktivisme digital sangat penting karena dapat memperluas kesempatan untuk berpartisipasi dalam percakapan publik serta berbagi ide dan

pengalaman, terutama dalam konteks demokrasi di Indonesia.

Aktivisme Digital di media sosial sangat penting untuk memahami pengaruhnya terhadap proses penjagaan gerbang di ekosistem media sosial. Hal ini dapat menjadi faktor penting dalam membangun kekuatan yang efektif untuk memfasilitasi arus bebas informasi dan menjaga kebebasan berekspresi di media sosial. Oleh karena itu, memahami Aktivisme Digital di media sosial sangat penting dalam menjaga kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia.

Peneliti menggunakan konsep Aktivisme Digital sebagai pendekatan untuk memahami pengaruh perilaku pengguna media sosial terhadap realitas sosial, khususnya dalam konteks politik di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat saat ini menggunakan media sosial sebagai platform untuk mengekspresikan pendapat mereka. Jika fenomena Aktivisme Digital semakin meningkat, hal ini dapat mengindikasikan meningkatnya tingkat kebebasan berpendapat di masyarakat yang pada akhirnya dapat mengembangkan proses demokrasi di Indonesia.

1.7.2 Konsep Demokrasi Digital

Demokrasi digital menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses politik dan pemerintahan. Idealnya, Internet menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah melalui berbagai saluran komunikasi digital untuk mempengaruhi pembentukan kebijakan dan peraturan publik di suatu negara.

Demokrasi digital merupakan implementasi demokrasi melalui media sosial online dalam komunikasi politik. Konsep ini berkembang seiring berkembangnya Web 2.0, memberikan hak partisipatif kepada pengguna dengan dampak signifikan pada berbagai aspek politik. Munculnya istilah-istilah baru seperti diplomasi 2.0, demokrasi 2.0, dan pemerintahan 2.0 membuka diskusi yang lebih kompleks. Situs jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter telah menjadi alat penting dalam mempromosikan politisi, memungkinkan mereka dengan cepat menyampaikan informasi terkait aktivitas politik kepada masyarakat umum.

Demokrasi digital memainkan peran penting dalam memahami latar belakang penelitian sebelumnya. Perkembangan demokrasi yang signifikan di Indonesia tercermin dari penggunaan media sosial sebagai alternatif bentuk komunikasi di masyarakat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan ekspresi tanpa melibatkan elit politik. Respon masyarakat media sosial terhadap kasus-kasus sosial-politik yang ada menggambarkan bagaimana demokrasi berjalan dengan teknologi terkini dan mempengaruhi elit untuk mengambil keputusan berdasarkan analisis reaksi media sosial.

Peneliti menggunakan konsep demokrasi digital untuk menganalisis bagaimana perkembangan teknologi, terutama melalui media sosial, dapat mempengaruhi pembentukan demokrasi di Indonesia. Dengan mempelajari dampak digitalisasi terhadap demokrasi melalui platform media sosial seperti

Twitter, peneliti dapat memahami pentingnya media sosial dalam konteks demokrasi, baik saat ini maupun di masa depan.

Untuk menjembatani kerangka menjembatani kerangka teori dengan data empiris, penelitian ini menggunakan konsep yang digunakan teori-teori utama ke variabel dan indikator yang dapat diamati dalam data media sosial dan hasil wawancara. Operasionalisasi ini disusun berdasarkan tujuan penelitian dan rumusan masalah masalah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Konsep Teoritis	Variabel Fokus	Indikator Operasional	Sumber Data
Fake Activism	Karakter akun tidak otentik	Nama pengguna acak, tidak ada foto, konten identik, waktu posting berdekatan	Hasil <i>crawling</i> Twotter (X)
Propaganda Komputasi	Pola penyebaran sistematis	Repetisi konten, koordinasi waktu, penggunaan hastag seragam, volume tinggi	Log tweet via Python, CSV analisis
Demokrasi Digital	Kualitas partisipasi publik	Dominasi narasi tunggal, hilangnya kontra-narasi, suara minoritas	Analisis konten + wawancara

		tidak terlihat	
Hegemoni Media	Dominasi narasi politik	Minimnya representasi suara opisis, sentralisasi informasi, arah narasi hanya satu pihak	Narasi tweet + wawancara ahli

